S.J.D.I. UNSOED
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 76 /Permentan/OT.140/12/2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140 /2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2008 tanggal 3 – 5 Desember 2007, di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Hasil Rapat Koordinasi Pokja Kebijakan Pupuk tanggal 24 Desember 2007, di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
13. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).

14. Kelompoktani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

(2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.

(3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2008.

(2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut sub sektor, provinsi, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada Lampiran 1, 2, dan 3 Peraturan ini.

(3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

(6) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompoktani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang.

Pasal 4

(1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.

(3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.

(4) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan usulan Gubernur.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik.

(2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen.

(3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

(1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.200,- per kg;
b. Pupuk ZA	=	Rp. 1.050,- per kg;
c. Pupuk SP-36	=	Rp. 1.550,- per kg;
d. Pupuk NPKphonska (15:15:15)	=	Rp. 1.750,- per kg;
e. Pupuk NPKpelangi (20:10:10)	=	Rp. 1.830,- per kg;
f. Pupuk NPKkujang (30: 6: 8)	=	Rp. 1.586,- per kg;
g. Pupuk Organik	=	Rp. 1.000,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.

(2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

(1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan teguran secara tertulis oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

(3) Apabila teguran dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
7. *Gubernur di seluruh Indonesia*;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76/Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR

(Ton)

Sub Sektor	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	2.730.000	461.367	297.870	572.895	345.000
Hortikultura	387.109	39.173	121.475	80.755	-
Perkebunan	926.681	240.925	278.992	246.350	-
Peternakan	12.403	1.079	1.661	-	-
Perikanan Budidaya	143.807	57.456	-	-	-
Cadangan Nasional	100.000	-	-	-	-
JUMLAH	**4.300.000**	**800.000**	**700.000**	**900.000**	**345.000**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

(Ton)

NO.	PROPINSI	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	51.555	14.400	4.341	13.500	2.000
2	SUMATERA UTARA	168.532	36.147	39.575	54.045	19.000
3	SUMATERA BARAT	71.795	28.000	14.310	32.400	13.000
4	J A M B I	41.483	18.400	3.444	10.800	5.000
5	R I A U	54.577	12.000	4.835	12.600	5.000
6	BENGKULU	20.005	9.200	1.828	9.000	4.000
7	SUMATERA SELATAN	165.483	40.000	3.708	36.000	5.000
8	BANGKA BELITUNG	14.949	2.800	591	4.500	5.000
9	LAMPUNG	243.883	44.745	7.674	45.000	12.000
10	KEP. RIAU	977	320	30	540	400
11	DKI. JAKARTA	977	64	10	180	50
12	BANTEN	73.059	15.200	1.350	14.850	19.950
13	JAWA BARAT	708.416	148.000	65.655	126.000	53.000
14	D.I. YOGYAKARTA	64.998	20.000	11.395	13.050	25.000
15	JAWA TENGAH	796.047	132.000	122.251	135.000	55.000
16	JAWA TIMUR	1.074.419	176.000	334.412	270.000	70.000
17	B A L I	48.262	4.800	8.815	15.750	25.000
18	KALIMANTAN BARAT	38.226	7.200	257	13.500	1.500
19	KALIMANTAN TENGAH	12.189	4.800	122	8.100	1.300
20	KALIMANTAN SELATAN	43.695	7.411	937	9.000	1.500
21	KALIMANTAN TIMUR	14.165	6.400	1.190	5.850	1.500
22	SULAWESI UTARA	20.077	3.833	70	7.200	1.500
23	GORONTALO	11.811	1.600	55	6.750	1.000
24	SULAWESI TENGAH	38.328	4.000	6.705	6.300	1.500
25	SULAWESI TENGGARA	19.535	5.600	3.841	3.600	1.500
26	SULAWESI SELATAN	242.523	36.000	50.152	27.450	7.550
27	SULAWESI BARAT	15.582	3.200	4.578	2.610	500
28	NUSA TENGGARA BARAT	116.335	12.000	7.001	10.800	6.000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	17.913	4.000	242	1.350	250
30	MALUKU	3.144	200	23	1.125	250
31	PAPUA	4.203	1.200	409	1.350	250
32	MALUKU UTARA	1.064	160	3	720	250
33	IRJA BARAT	1.797	320	191	1.080	250
	CADANGAN	100.000	-	-	-	-
	JUMLAH PROPINSI	**4.300.000**	**800.000**	**700.000**	**900.000**	**345.000**

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

Jenis Pupuk	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
UREA	4.200.000	571.200	491.400	390.698	306.698	350.065	298.200	252.000	231.000	252.000	315.000	347.135	394 605
SP-36	800.000	80.000	72.000	72.000	64.000	56.000	64.000	64.000	56.000	48.000	64.000	72.000	88 000
ZA	700.000	69.300	58.100	56.000	49.000	63.000	56.000	56.000	50.400	51.800	58.800	63.700	67 900
NPK	900.000	54.000	72.000	54.000	63.000	81.000	72.000	63.000	72.000	72.000	90.000	99.000	108 000
ORGANIK	345.000	20.700	27.600	20.700	24.150	31.050	27.600	24.150	27.600	27.600	34.500	37.950	41 400
JUMLAH	6.945.000	795.200	721.100	593.398	506.848	581.115	517.800	459.150	437.000	451.400	562.300	619.785	699.905

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	2.730.000	371.280	319.410	253.953	199.353	227.542	193.830	163.800	150.150	163.800	204.750	225.638	256 493
Hortikultura	367.109	52.647	45.292	36.010	28.268	32.265	27.485	23.227	21.291	23.227	29.033	31.995	36 370
Perkebunan	926 681	126.029	108.422	86.203	67.669	77.238	65 794	55.601	50.967	55.601	69.501	76.591	87 065
Peternakan	12 403	1.687	1.451	1.154	905	1.034	881	744	682	744	930	1.025	1 165
Perikanan Budidaya	143 807	19.558	16.825	13.377	10.501	11.986	10.210	8.628	7.909	8.628	10.786	11.886	13 511
JUMLAH	4.200.000	571.200	491.400	390.698	306.698	350.065	298.200	252.000	231.000	252.000	315.000	347.135	394.605

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	461.367	46.137	41.523	41.523	36.909	32.296	36.909	36.909	32.296	27.682	36.909	41.523	50 750
Hortikultura	39.173	3.917	3.526	3.526	3.134	2.742	3.134	3.134	2.742	2.350	3.134	3.526	4 309
Perkebunan	240.925	24.093	21.683	21.683	19.274	16.865	19.274	19.274	16.865	14.456	19.274	21.683	26 502
Peternakan	1.079	108	97	97	86	76	86	86	76	65	86	97	119
Perikanan Budidaya	57.456	5.746	5.171	5.171	4.596	4.022	4.596	4.596	4.022	3.447	4.596	5.171	6 320
JUMLAH	800.000	80.000	72.000	72.000	64.000	56.000	64.000	64.000	56.000	48.000	64.000	72.000	88.000

Lanjutan

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ZA

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	297.670	29.489	24.723	23.830	20.851	26.808	23.830	23.830	21.447	22.042	25.021	27.106	28 893
Hortikultura	121.475	12.026	10.082	9.718	8.503	10.933	9.718	9.718	8.746	8.989	10.204	11.054	11 783
Perkebunan	278.992	27.620	23.156	22.319	19.529	25.109	22.319	22.319	20.087	20.645	23.435	25.388	27 362
Peternakan	1.661	164	138	133	116	150	133	133	120	123	140	151	161
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	700.000	69.300	58.100	56.000	49.000	63.000	56.000	56.000	50.400	51.800	58.800	63.700	67.900

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : NPK

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	572.895	34.374	45.832	34.374	40.103	51.561	45.832	40.103	45.832	45.832	57.289	63.018	68 747
Hortikultura	80.755	4.845	6.460	4.845	5.653	7.268	6.460	5.653	6.460	6.460	8.076	8.883	9 691
Perkebunan	246.350	14.781	19.708	14.781	17.245	22.172	19.708	17.245	19.708	19.708	24.635	27.099	29 562
Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	900.000	54.000	72.000	54.000	63.000	81.000	72.000	63.000	72.000	72.000	90.000	99.000	108.000

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ORGANIK

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	345.000	20.700	27.600	20.700	24.150	31.050	27.600	24.150	27.600	27.600	34.500	37.950	41.400
Hortikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	345.000	20.700	27.600	20.700	24.150	31.050	27.600	24.150	27.600	27.600	34.500	37.950	41.400

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	51.555	7.011	6.032	4.796	3.765	4.297	3.660	3.093	2.835	3.093	3.867	4.261	4.844
2	SUMATERA UTARA	168.532	22.920	19.718	15.67[illegible]	12.307	14.047	11.966	10.112	9.269	10.112	12.640	13.929	15.834
3	SUMATERA BARAT	71.795	9.764	8.400	6.679	5.243	5.984	5.097	4.308	3.949	4.308	5.385	5.934	6.745
4	J A M B I	41.483	5.642	4.854	3.859	3.029	3.458	2.945	2.489	2.282	2.489	3.111	3.429	3.898
5	R I A U	54.577	7.422	6.385	5.077	3.985	4.549	3.875	3.275	3.002	3.275	4.093	4.511	5.128
6	BENGKULU	20.005	2.721	2.341	1.861	1.461	1.667	1.420	1.200	1.100	1.200	1.500	1.653	1.880
7	SUMATERA SELATAN	165.483	22.506	19.362	15.394	12.084	13.793	11.749	9.929	9.102	9.929	12.411	13.677	15.548
8	BANGKA BELITUNG	14.949	2.033	1.749	1.391	1.092	1.246	1.061	897	822	897	1.121	1.236	1.405
9	LAMPUNG	243.883	33.168	28.534	22.687	17.809	20.327	17.316	14.633	13.414	14.633	18.291	20.157	22.914
10	KEP. RIAU	977	133	114	91	71	81	69	59	54	59	73	81	92
11	DKI. JAKARTA	977	133	114	91	71	81	69	59	54	59	73	81	92
12	BANTEN	73.059	9.936	8.548	6.796	5.335	6.089	5.187	4.384	4.018	4.384	5.479	6.038	6.864
13	JAWA BARAT	708.416	96.345	82.885	65.899	51.731	59.046	50.298	42.505	38.963	42.505	53.131	58.551	66.558
14	D.I. YOGYAKARTA	64.998	8.840	7.605	6.046	4.746	5.418	4.615	3.900	3.575	3.900	4.875	5.372	6.107
15	JAWA TENGAH	796.047	108.262	93.137	74.051	58.130	66.350	56.519	47.763	43.783	47.763	59.703	65.794	74.791
16	JAWA TIMUR	1.074.419	146.121	125.707	99.946	78.458	89.552	76.284	64.465	59.093	64.465	80.581	88.802	100.945
17	B A L I	48.262	6.564	5.647	4.489	3.524	4.023	3.427	2.896	2.654	2.896	3.620	3.989	4.534
18	KALIMANTAN BARAT	38.226	5.199	4.472	3.556	2.791	3.186	2.714	2.294	2.102	2.294	2.867	3.159	3.591
19	KALIMANTAN TENGAH	12.189	1.658	1.426	1.134	890	1.016	865	731	670	731	914	1.007	1.145
20	KALIMANTAN SELATAN	43.695	5.942	5.112	4.065	3.191	3.642	3.102	2.622	2.403	2.622	3.277	3.611	4.105
21	KALIMANTAN TIMUR	14.165	1.926	1.657	1.318	1.034	1.181	1.006	850	779	850	1.062	1.171	1.331
22	SULAWESI UTARA	20.077	2.730	2.349	1.868	1.466	1.673	1.425	1.205	1.104	1.205	1.506	1.659	1.886
23	GORONTALO	11.811	1.606	1.382	1.099	862	984	839	709	650	709	886	976	1.110
24	SULAWESI TENGAH	38.328	5.213	4.484	3.565	2.799	3.195	2.721	2.300	2.108	2.300	2.875	3.168	3.601
25	SULAWESI TENGGARA	19.535	2.657	2.286	1.817	1.427	1.628	1.387	1.172	1.074	1.172	1.465	1.615	1.835
26	SULAWESI SELATAN	242.523	32.983	28.375	22.560	17.710	20.214	17.219	14.551	13.339	14.551	18.189	20.045	22.786
27	SULAWESI BARAT	15.582	2.119	1.823	1.449	1.138	1.299	1.106	935	857	935	1.169	1.288	1.464
28	NUSA TENGGARA BARAT	116.335	15.822	13.611	10.822	8.495	9.696	8.260	6.980	6.398	6.980	8.725	9.615	10.930
29	NUSA TENGGARA TIMUR	17.913	2.436	2.096	1.666	1.308	1.493	1.272	1.075	985	1.075	1.343	1.480	1.683
30	MALUKU	3.144	428	368	292	230	262	223	189	173	189	236	260	295
31	PAPUA	4.203	572	492	391	307	350	298	252	231	252	315	347	395
32	MALUKU UTARA	1.064	145	124	99	78	89	76	64	59	64	80	88	100
33	IRJA BARAT	1.797	244	210	167	131	150	128	108	99	108	135	149	169
	JUMLAH PROPINSI	**4.200.000**	**571.200**	**491.400**	**390.698**	**306.698**	**350.065**	**298.200**	**252.000**	**231.000**	**252.000**	**315.000**	**347.135**	**394.605**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	33.510	4.557	3.921	3.117	2.447	2.793	2.379	2.011	1.843	2.011	2.513	2.770	3.148
2	SUMATERA UTARA	109.546	14.898	12.817	10.190	7.999	9.131	7.778	6.573	6.025	6.573	8.216	9.054	10.292
3	SUMATERA BARAT	46.666	6.347	5.460	4.341	3.408	3.890	3.313	2.800	2.567	2.800	3.500	3.857	4.384
4	J A M B I	26.964	3.667	3.155	2.508	1.969	2.247	1.914	1.618	1.483	1.618	2.022	2.229	2.533
5	R I A U	35.475	4.825	4.151	3.300	2.590	2.957	2.519	2.128	1.951	2.128	2.661	2.932	3.333
6	BENGKULU	13.003	1.768	1.521	1.210	950	1.084	923	780	715	780	975	1.075	1.222
7	SUMATERA SELATAN	107.564	14.629	12.585	10.006	7.855	8.965	7.637	6.454	5.916	6.454	8.067	8.890	10.106
8	BANGKA BELITUNG	9.717	1.321	1.137	904	710	810	690	583	534	583	729	803	913
9	LAMPUNG	158.524	21.559	18.547	14.746	11.576	13.213	11.255	9.511	8.719	9.511	11.889	13.102	14.894
10	KEP. RIAU	635	86	74	59	46	53	45	38	35	38	48	52	60
11	DKI. JAKARTA	635	86	74	59	46	53	45	38	35	38	48	52	60
12	BANTEN	47.488	6.458	5.556	4.417	3.468	3.958	3.372	2.849	2.612	2.849	3.562	3.925	4.462
13	JAWA BARAT	460.470	62.624	53.875	42.834	33.625	38.380	32.693	27.628	25.326	27.628	34.535	38.058	43.263
14	D.I. YOGYAKARTA	42.249	5.746	4.943	3.930	3.085	3.521	3.000	2.535	2.324	2.535	3.169	3.492	3.969
15	JAWA TENGAH	517.430	70.371	60.539	48.133	37.784	43.127	36.738	31.046	28.459	31.046	38.807	42.766	48.614
16	JAWA TIMUR	698.372	94.979	81.710	64.965	50.997	58.209	49.584	41.902	38.410	41.902	52.378	57.721	65.614
17	B A L I	31.370	4.266	3.670	2.918	2.291	2.615	2.227	1.882	1.725	1.882	2.353	2.593	2.947
18	KALIMANTAN BARAT	24.847	3.379	2.907	2.311	1.814	2.071	1.764	1.491	1.367	1.491	1.864	2.054	2.334
19	KALIMANTAN TENGAH	7.923	1.077	927	737	579	660	563	475	436	475	594	655	744
20	KALIMANTAN SELATAN	28.402	3.863	3.323	2.642	2.074	2.367	2.017	1.704	1.562	1.704	2.130	2.347	2.668
21	KALIMANTAN TIMUR	9.207	1.252	1.077	856	672	767	654	552	506	552	691	761	865
22	SULAWESI UTARA	13.050	1.775	1.527	1.214	953	1.088	927	783	718	783	979	1.079	1.226
23	GORONTALO	7.677	1.044	898	714	561	640	545	461	422	461	576	635	721
24	SULAWESI TENGAH	24.913	3.388	2.915	2.318	1.819	2.077	1.769	1.495	1.370	1.495	1.869	2.059	2.341
25	SULAWESI TENGGARA	12.698	1.727	1.486	1.181	927	1.058	902	762	698	762	952	1.049	1.193
26	SULAWESI SELATAN	157.640	21.439	18.444	14.664	11.511	13.139	11.192	9.458	8.670	9.458	11.823	13.029	14.811
27	SULAWESI BARAT	10.128	1.377	1.185	942	740	844	719	608	557	608	760	837	952
28	NUSA TENGGARA BARAT	75.618	10.284	8.847	7.034	5.522	6.303	5.369	4.537	4.159	4.537	5.671	6.250	7.105
29	NUSA TENGGARA TIMUR	11.643	1.583	1.362	1.083	850	970	827	699	640	699	873	962	1.094
30	MALUKU	2.044	278	239	190	149	170	145	123	112	123	153	169	192
31	PAPUA	2.732	372	320	254	199	228	194	164	150	164	205	226	257
32	MALUKU UTARA	691	94	81	64	50	58	49	41	38	41	52	57	65
33	IRJA BARAT	1.168	159	137	109	85	97	83	70	64	70	88	97	110
JUMLAH PROPINSI		**2.730.000**	**371.280**	**319.410**	**253.953**	**199.353**	**227.542**	**193.830**	**163.800**	**150.150**	**163.800**	**204.750**	**225.638**	**256.493**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	4.752	646	556	442	347	395	337	285	261	285	356	393	446
2	SUMATERA UTARA	15.533	2.113	1.817	1.445	1.134	1.295	1.103	932	854	932	1.165	1.284	1.459
3	SUMATERA BARAT	6.617	900	774	616	483	552	470	397	364	397	496	547	622
4	JAMBI	3.823	520	447	356	279	319	271	229	210	229	287	316	359
5	RIAU	5.030	684	589	468	367	419	357	302	277	302	377	416	473
6	BENGKULU	1.844	251	216	172	135	154	131	111	101	111	138	152	173
7	SUMATERA SELATAN	15.252	2.074	1.785	1.419	1.114	1.271	1.083	915	839	915	1.144	1.261	1.433
8	BANGKA BELITUNG	1.378	187	161	128	101	115	98	83	76	83	103	114	129
9	LAMPUNG	22.478	3.057	2.630	2.091	1.641	1.874	1.596	1.349	1.236	1.349	1.686	1.858	2.112
10	KEP. RIAU	90	12	11	8	7	8	6	5	5	5	7	7	8
11	DKI. JAKARTA	90	12	11	8	7	8	6	5	5	5	7	7	8
12	BANTEN	6.734	916	788	626	492	561	478	404	370	404	505	557	633
13	JAWA BARAT	65.294	8.880	7.639	6.074	4.768	5.442	4.636	3.918	3.591	3.918	4.897	5.397	6.135
14	D.I. YOGYAKARTA	5.991	815	701	557	437	499	425	359	329	359	449	495	563
15	JAWA TENGAH	73.371	9.978	8.584	6.825	5.358	6.115	5.209	4.402	4.035	4.402	5.503	6.064	6.893
16	JAWA TIMUR	99.028	13.468	11.586	9.212	7.231	8.254	7.031	5.942	5.447	5.942	7.427	8.185	9.304
17	BALI	4.448	605	520	414	325	371	316	267	245	267	334	368	418
18	KALIMANTAN BARAT	3.523	479	412	328	257	294	250	211	194	211	264	291	331
19	KALIMANTAN TENGAH	1.123	153	131	105	82	94	80	67	62	67	84	93	106
20	KALIMANTAN SELATAN	4.027	548	471	375	294	336	286	242	222	242	302	333	378
21	KALIMANTAN TIMUR	1.306	178	153	121	95	109	93	78	72	78	98	108	123
22	SULAWESI UTARA	1.850	252	217	172	135	154	131	111	102	111	139	153	174
23	GORONTALO	1.089	148	127	101	79	91	77	65	60	65	82	90	102
24	SULAWESI TENGAH	3.533	480	413	329	258	294	251	212	194	212	265	292	332
25	SULAWESI TENGGARA	1.801	245	211	167	131	150	128	108	99	108	135	149	169
26	SULAWESI SELATAN	22.353	3.040	2.615	2.079	1.632	1.863	1.587	1.341	1.229	1.341	1.676	1.848	2.100
27	SULAWESI BARAT	1.436	195	168	134	105	120	102	86	79	86	108	119	135
28	NUSA TENGGARA BARAT	10.722	1.458	1.255	997	783	894	761	643	590	643	804	886	1.007
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1.651	225	193	154	121	138	117	99	91	99	124	136	155
30	MALUKU	290	39	34	27	21	24	21	17	16	17	22	24	27
31	PAPUA	387	53	45	36	28	32	28	23	21	23	29	32	36
32	MALUKU UTARA	98	13	11	9	7	8	7	6	5	6	7	8	9
33	IRJA BARAT	166	23	19	15	12	14	12	10	9	10	12	14	16
JUMLAH PROPINSI		**387.109**	**52.647**	**45.292**	**36.010**	**28.268**	**32.265**	**27.485**	**23.227**	**21.291**	**23.227**	**29.033**	**31.995**	**36.370**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	11.375	1.547	1.331	1.058	831	948	808	682	626	682	853	940	1.069
2	SUMATERA UTARA	37.185	5.057	4.351	3.459	2.715	3.099	2.640	2.231	2.045	2.231	2.789	3.073	3.494
3	SUMATERA BARAT	15.941	2.154	1.853	1.474	1.157	1.320	1.125	950	871	950	1.188	1.309	1.488
4	JAMBI	9.153	1.245	1.071	851	668	763	650	549	503	549	686	756	860
5	RIAU	12.042	1.638	1.409	1.120	879	1.004	855	723	662	723	903	995	1.131
6	BENGKULU	4.414	600	516	411	322	368	313	265	243	265	331	365	415
7	SUMATERA SELATAN	36.512	4.966	4.272	3.396	2.666	3.043	2.592	2.191	2.008	2.191	2.738	3.018	3.430
8	BANGKA BELITUNG	3.298	449	386	307	241	275	234	198	181	198	247	273	310
9	LAMPUNG	53.810	7.318	6.296	5.006	3.929	4.485	3.821	3.229	2.960	3.229	4.036	4.447	5.056
10	KEP. RIAU	216	29	25	20	16	18	15	13	12	13	16	18	20
11	DKI. JAKARTA	216	29	25	20	16	18	15	13	12	13	16	18	20
12	BANTEN	16.120	2.192	1.886	1.499	1.177	1.344	1.144	967	887	967	1.209	1.332	1.514
13	JAWA BARAT	156.304	21.257	18.288	14.540	11.414	13.028	11.098	9.378	8.597	9.378	11.723	12.919	14.685
14	D.I. YOGYAKARTA	14.341	1.950	1.678	1.334	1.047	1.195	1.018	860	789	860	1.076	1.185	1.347
15	JAWA TENGAH	175.638	23.887	20.550	16.338	12.826	14.639	12.470	10.538	9.660	10.538	13.173	14.517	16.502
16	JAWA TIMUR	237.058	32.240	27.736	22.052	17.311	19.758	16.831	14.223	13.038	14.223	17.779	19.593	22.272
17	BALI	10.648	1.448	1.246	991	778	888	756	639	586	639	799	880	1.000
18	KALIMANTAN BARAT	6.434	1.147	987	785	616	703	599	506	464	506	633	697	792
19	KALIMANTAN TENGAH	2.689	366	315	250	196	224	191	161	148	161	202	222	253
20	KALIMANTAN SELATAN	9.641	1.311	1.128	897	704	804	684	578	530	578	723	797	906
21	KALIMANTAN TIMUR	3.125	425	366	291	228	260	222	188	172	188	234	258	294
22	SULAWESI UTARA	4.430	602	518	412	323	369	315	266	244	266	332	366	416
23	GORONTALO	2.606	354	305	242	190	217	185	156	143	156	195	215	245
24	SULAWESI TENGAH	8.457	1.150	989	787	618	705	600	507	465	507	634	699	795
25	SULAWESI TENGGARA	4.310	586	504	401	315	359	306	259	237	259	323	356	405
26	SULAWESI SELATAN	53.510	7.277	6.261	4.978	3.907	4.460	3.799	3.211	2.943	3.211	4.013	4.423	5.027
27	SULAWESI BARAT	3.438	468	402	320	251	287	244	206	189	206	258	284	323
28	NUSA TENGGARA BARAT	25.668	3.491	3.003	2.388	1.874	2.139	1.822	1.540	1.412	1.540	1.925	2.121	2.412
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3.952	537	462	368	289	329	281	237	217	237	296	327	371
30	MALUKU	694	94	81	65	51	58	49	42	38	42	52	57	65
31	PAPUA	927	126	108	86	68	77	66	56	51	56	70	77	87
32	MALUKU UTARA	235	32	27	22	17	20	17	14	13	14	18	19	22
33	IRJA BARAT	397	54	46	37	29	33	28	24	22	24	30	33	37
	JUMLAH PROPINSI	**926.681**	**126.029**	**108.422**	**86.203**	**67.669**	**77.238**	**65.794**	**55.601**	**50.967**	**55.601**	**69.501**	**76.591**	**87.065**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	152	21	18	14	11	13	11	9	8	9	11	13	14
2	SUMATERA UTARA	498	68	58	46	36	41	35	30	27	30	37	41	47
3	SUMATERA BARAT	212	29	25	20	15	18	15	13	12	13	16	18	20
4	J A M B I	123	17	14	11	9	10	9	7	7	7	9	10	12
5	R I A U	161	22	19	15	12	13	11	10	9	10	12	13	15
6	BENGKULU	69	8	7	5	4	5	4	4	3	4	4	5	6
7	SUMATERA SELATAN	469	66	57	45	36	41	35	29	27	29	37	40	46
8	BANGKA BELITUNG	44	6	5	4	3	4	3	3	2	3	3	4	4
9	LAMPUNG	720	98	84	67	53	60	51	43	40	43	54	60	68
10	KEP. RIAU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	216	29	25	20	16	18	15	13	12	13	16	18	20
13	JAWA BARAT	2.092	285	245	195	153	174	149	126	115	126	157	173	197
14	D.I. YOGYAKARTA	192	26	22	18	14	16	14	12	11	12	14	16	18
15	JAWA TENGAH	2.351	320	275	219	172	196	167	141	129	141	176	194	221
16	JAWA TIMUR	3.173	432	371	295	232	264	225	190	175	190	238	262	298
17	B A L I	143	19	17	13	10	12	10	9	8	9	11	12	13
18	KALIMANTAN BARAT	113	15	13	11	8	9	8	7	6	7	8	9	11
19	KALIMANTAN TENGAH	36	5	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
20	KALIMANTAN SELATAN	129	18	15	12	9	11	9	8	7	8	10	11	12
21	KALIMANTAN TIMUR	42	6	5	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4
22	SULAWESI UTARA	59	8	7	6	4	5	4	4	3	4	4	5	6
23	GORONTALO	35	5	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
24	SULAWESI TENGAH	113	15	13	11	8	9	8	7	6	7	8	9	11
25	SULAWESI TENGGARA	58	8	7	5	4	5	4	3	3	3	4	5	5
26	SULAWESI SELATAN	716	97	84	67	52	60	51	43	39	43	54	59	67
7	SULAWESI BARAT	46	6	5	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4
28	NUSA TENGGARA BARAT	344	47	40	32	25	29	24	21	19	21	26	28	32
29	NUSA TENGGARA TIMUR	53	7	6	5	4	4	4	3	3	3	4	4	5
30	MALUKU	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	MALUKU UTARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	**12.403**	**1.687**	**1.451**	**1.154**	**906**	**1.034**	**881**	**744**	**682**	**744**	**930**	**1.025**	**1.165**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	1.765	240	207	164	129	147	125	106	97	106	132	146	166
2	SUMATERA UTARA	5.770	785	675	537	421	481	410	346	317	346	433	477	542
3	SUMATERA BARAT	2.458	334	288	229	180	205	175	147	135	147	184	203	231
4	J A M B I	1.420	193	166	132	104	118	101	85	78	85	107	117	133
5	R I A U	1.869	254	219	174	136	156	133	112	103	112	140	154	176
6	BENGKULU	685	93	80	64	50	57	49	41	38	41	51	57	64
7	SUMATERA SELATAN	5.666	771	663	527	414	472	402	340	312	340	425	468	532
8	BANGKA BELITUNG	512	70	60	48	37	43	36	31	28	31	38	42	48
9	LAMPUNG	8.350	1.136	977	777	610	696	593	501	459	501	626	690	785
10	KEP. RIAU	33	5	4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3
11	DKI. JAKARTA	33	5	4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3
12	BANTEN	2.502	340	293	233	183	208	176	150	138	150	188	207	235
13	JAWA BARAT	24.256	3.299	2.838	2.256	1.771	2.022	1.722	1.455	1.334	1.455	1.819	2.005	2.279
14	D.I. YOGYAKARTA	2.226	303	260	207	163	185	158	134	122	134	167	184	209
15	JAWA TENGAH	27.256	3.707	3.189	2.535	1.990	2.272	1.935	1.635	1.499	1.635	2.044	2.253	2.561
16	JAWA TIMUR	36.788	5.003	4.304	3.422	2.686	3.066	2.612	2.207	2.023	2.207	2.759	3.041	3.456
17	B A L I	1.652	225	193	154	121	138	117	99	91	99	124	137	155
18	KALIMANTAN BARAT	1.309	178	153	122	96	109	93	79	72	79	98	108	123
19	KALIMANTAN TENGAH	417	57	49	39	30	35	30	25	23	25	31	34	39
20	KALIMANTAN SELATAN	1.496	203	175	139	109	125	106	90	82	90	112	124	141
21	KALIMANTAN TIMUR	485	66	57	45	35	40	34	29	27	29	36	40	46
22	SULAWESI UTARA	687	93	80	64	50	57	49	41	38	41	52	57	65
23	GORONTALO	404	55	47	38	30	34	29	24	22	24	30	33	38
24	SULAWESI TENGAH	1.312	178	154	122	96	109	93	79	72	79	98	108	123
25	SULAWESI TENGGARA	669	91	78	62	49	56	47	40	37	40	50	55	63
26	SULAWESI SELATAN	8.304	1.129	972	772	606	692	590	498	457	498	623	686	780
27	SULAWESI BARAT	534	73	62	50	39	44	38	32	29	32	40	44	50
28	NUSA TENGGARA BARAT	3.983	542	466	371	291	332	283	239	219	239	299	329	374
29	NUSA TENGGARA TIMUR	613	83	72	57	45	51	44	37	34	37	46	51	58
30	MALUKU	108	15	13	10	8	9	8	6	6	6	8	9	10
31	PAPUA	144	20	17	13	11	12	10	9	8	9	11	12	14
32	MALUKU UTARA	36	5	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3
33	IRJA BARAT	62	8	7	6	4	5	4	4	3	4	5	5	6
JUMLAH PROPINSI		**143.807**	**19.558**	**16.825**	**13.377**	**10.501**	**11.986**	**10.210**	**8.628**	**7.909**	**8.628**	**10.786**	**11.886**	**13.511**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	14.400	1.440	1.296	1.296	1.152	1.008	1.152	1.152	1.008	864	1.152	1.296	1.584
2	SUMATERA UTARA	36.147	3.615	3.253	3.253	2.892	2.530	2.892	2.892	2.530	2.169	2.892	3.253	3.976
3	SUMATERA BARAT	28.000	2.800	2.520	2.520	2 240	1.960	2.240	2.240	1.960	1.680	2.240	2.520	3.080
4	JAMBI	18.400	1.840	1.656	1.656	1.472	1.288	1.472	1.472	1.288	1.104	1.472	1.656	2.024
5	RIAU	12.000	1.200	1.080	1.080	960	840	960	960	840	720	960	1.080	1.320
6	BENGKULU	9.200	920	828	828	736	644	736	736	644	552	736	828	1.012
7	SUMATERA SELATAN	40.000	4.000	3.600	3.600	3.200	2.800	3.200	3.200	2.800	2.400	3.200	3.600	4.400
8	BANGKA BELITUNG	2.800	280	252	252	224	196	224	224	196	168	224	252	308
9	LAMPUNG	44.745	4.474	4.027	4.027	3.580	3.132	3.580	3.580	3.132	2.685	3.580	4.027	4.922
10	KEP. RIAU	320	32	29	29	26	22	26	26	22	19	26	29	35
11	DKI. JAKARTA	64	6	6	6	5	4	5	5	4	4	5	6	7
12	BANTEN	15.200	1.520	1.368	1.368	1.216	1.064	1.216	1.216	1.064	912	1.216	1.368	1.672
13	JAWA BARAT	148.000	14.800	13.320	13.320	11.840	10.360	11.840	11.840	10.360	8.880	11.840	13.320	16.280
14	D.I. YOGYAKARTA	20.000	2.000	1.800	1.800	1.600	1.400	1.600	1.600	1.400	1.200	1.600	1.800	2.200
15	JAWA TENGAH	132.000	13.200	11.880	11.880	10.560	9.240	10.560	10.560	9.240	7.920	10.560	11.880	14.520
16	JAWA TIMUR	176.000	17.600	15.840	15.840	14.080	12.320	14.080	14.080	12.320	10.560	14.080	15.840	19.360
17	BALI	4.800	480	432	432	384	336	384	384	336	288	384	432	528
18	KALIMANTAN BARAT	7.200	720	648	648	576	504	576	576	504	432	576	648	792
19	KALIMANTAN TENGAH	4.800	480	432	432	384	336	384	384	336	288	384	432	528
20	KALIMANTAN SELATAN	7.411	741	667	667	593	519	593	593	519	445	593	667	815
21	KALIMANTAN TIMUR	6.400	640	576	576	512	448	512	512	448	384	512	576	704
22	SULAWESI UTARA	3.833	383	345	345	307	268	307	307	268	230	307	345	422
23	GORONTALO	1.600	160	144	144	128	112	128	128	112	96	128	144	176
24	SULAWESI TENGAH	4.000	400	360	360	320	280	320	320	280	240	320	360	440
25	SULAWESI TENGGARA	5.600	560	504	504	448	392	448	448	392	336	448	504	616
26	SULAWESI SELATAN	36.000	3.600	3.240	3.240	2.880	2.520	2.880	2.880	2.520	2.160	2.880	3.240	3.960
27	SULAWESI BARAT	3.200	320	288	288	256	224	256	256	224	192	256	288	352
28	NUSA TENGGARA BARAT	12.000	1.200	1.080	1.080	960	840	960	960	840	720	960	1.080	1.320
29	NUSA TENGGARA TIMUR	4.000	400	360	360	320	280	320	320	280	240	320	360	440
30	MALUKU	200	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
31	PAPUA	1.200	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	132
32	MALUKU UTARA	160	16	14	14	13	11	13	13	11	10	13	14	18
33	IRJA BARAT	320	32	29	29	26	22	26	26	22	19	26	29	35
	JUMLAH PROPINSI	**800.000**	**80.000**	**72.000**	**72.000**	**64.000**	**56.000**	**64.000**	**64.000**	**56.000**	**48.000**	**64.000**	**72.000**	**88.000**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	8.305	830	747	747	664	581	664	664	581	498	664	747	914
2	SUMATERA UTARA	20.845	2.085	1.876	1.876	1.668	1.459	1.668	1.668	1.459	1.251	1.668	1.876	2.293
3	SUMATERA BARAT	16.148	1.615	1.453	1.453	1.292	1.130	1.292	1.292	1.130	969	1.292	1.453	1.776
4	JAMBI	10.611	1.061	955	955	849	743	849	849	743	637	849	955	1.167
5	RIAU	8.921	892	623	623	554	484	554	554	484	415	554	623	761
6	BENGKULU	5.306	531	478	478	424	371	424	424	371	318	424	478	584
7	SUMATERA SELATAN	23.068	2.307	2.076	2.076	1.845	1.615	1.845	1.845	1.615	1.384	1.845	2.076	2.538
8	BANGKA BELITUNG	1.615	161	145	145	129	113	129	129	113	97	129	145	178
9	LAMPUNG	25.805	2.580	2.322	2.322	2.064	1.806	2.064	2.064	1.806	1.548	2.064	2.322	2.839
10	KEP. RIAU	185	18	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	20
11	DKI. JAKARTA	37	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
12	BANTEN	8.766	877	789	789	701	614	701	701	614	526	701	789	964
13	JAWA BARAT	85.353	8.535	7.682	7.682	6.828	5.975	6.828	6.828	5.975	5.121	6.828	7.682	9.389
14	D.I. YOGYAKARTA	11.534	1.153	1.038	1.038	923	807	923	923	807	692	923	1.038	1.269
15	JAWA TENGAH	76.126	7.613	6.851	6.851	6.090	5.329	6.090	6.090	5.329	4.568	6.090	6.851	8.374
16	JAWA TIMUR	101.501	10.150	9.135	9.135	8.120	7.105	8.120	8.120	7.105	6.090	8.120	9.135	11.165
17	BALI	2.768	277	249	249	221	194	221	221	194	166	221	249	305
18	KALIMANTAN BARAT	4.152	415	374	374	332	291	332	332	291	249	332	374	457
19	KALIMANTAN TENGAH	2.768	277	249	249	221	194	221	221	194	166	221	249	305
20	KALIMANTAN SELATAN	4.274	427	385	385	342	299	342	342	299	256	342	385	470
21	KALIMANTAN TIMUR	3.691	369	332	332	295	258	295	295	258	221	295	332	406
22	SULAWESI UTARA	2.210	221	199	199	177	155	177	177	155	133	177	199	243
23	GORONTALO	923	92	83	83	74	65	74	74	65	55	74	83	102
24	SULAWESI TENGAH	2.307	231	208	208	185	161	185	185	161	138	185	208	254
25	SULAWESI TENGGARA	3.230	323	291	291	258	226	258	258	226	194	258	291	355
26	SULAWESI SELATAN	20.762	2.076	1.869	1.869	1.661	1.453	1.661	1.661	1.453	1.246	1.661	1.869	2.284
27	SULAWESI BARAT	1.845	185	166	166	148	129	148	148	129	111	148	166	203
28	NUSA TENGGARA BARAT	6.921	692	623	623	554	484	554	554	484	415	554	623	761
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2.307	231	208	208	185	161	185	185	161	138	185	208	254
30	MALUKU	115	12	10	10	9	8	9	9	8	7	9	10	13
31	PAPUA	692	69	62	62	55	48	55	55	48	42	55	62	76
32	MALUKU UTARA	92	9	8	8	7	6	7	7	6	6	7	8	10
33	IRJA BARAT	185	18	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	20
	JUMLAH PROPINSI	**461.367**	**46.137**	**41.523**	**41.523**	**36.909**	**32.296**	**36.909**	**36.909**	**32.296**	**27.682**	**36.909**	**41.523**	**50.750**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	705	71	63	63	56	49	56	56	49	42	56	63	78
2	SUMATERA UTARA	1.770	177	159	159	142	124	142	142	124	106	142	159	195
3	SUMATERA BARAT	1.371	137	123	123	110	96	110	110	96	82	110	123	151
4	J A M B I	901	90	81	81	72	63	72	72	63	54	72	81	99
5	R I A U	595	59	53	53	47	41	47	47	41	35	47	53	65
6	BENGKULU	450	45	41	41	36	32	36	36	32	27	36	41	50
7	SUMATERA SELATAN	1.959	196	176	176	157	137	157	157	137	118	157	176	215
8	BANGKA BELITUNG	137	14	12	12	11	10	11	11	10	8	11	12	15
9	LAMPUNG	2.191	219	197	197	175	153	175	175	153	131	175	197	241
10	KEP. RIAU	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
11	DKI. JAKARTA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	744	74	67	67	60	52	60	60	52	45	60	67	82
13	JAWA BARAT	7.247	725	652	652	580	507	580	580	507	435	580	652	797
14	D.I. YOGYAKARTA	979	98	88	88	78	69	78	78	69	59	78	88	108
15	JAWA TENGAH	6.464	646	582	582	517	452	517	517	452	388	517	582	711
16	JAWA TIMUR	8.618	862	776	776	689	603	689	689	603	517	689	776	948
17	B A L I	235	24	21	21	19	16	19	19	16	14	19	21	26
18	KALIMANTAN BARAT	353	35	32	32	28	25	28	28	25	21	28	32	39
19	KALIMANTAN TENGAH	235	24	21	21	19	16	19	19	16	14	19	21	26
20	KALIMANTAN SELATAN	363	36	33	33	29	25	29	29	25	22	29	33	40
21	KALIMANTAN TIMUR	313	31	28	28	25	22	25	25	22	19	25	28	34
22	SULAWESI UTARA	188	19	17	17	15	13	15	15	13	11	15	17	21
23	GORONTALO	78	8	7	7	6	5	6	6	5	5	6	7	9
24	SULAWESI TENGAH	196	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
25	SULAWESI TENGGARA	274	27	25	25	22	19	22	22	19	16	22	25	30
26	SULAWESI SELATAN	1.763	176	159	159	141	123	141	141	123	106	141	159	194
27	SULAWESI BARAT	157	16	14	14	13	11	13	13	11	9	13	14	17
28	NUSA TENGGARA BARAT	588	59	53	53	47	41	47	47	41	35	47	53	65
29	NUSA TENGGARA TIMUR	196	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
30	MALUKU	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	59	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	6
32	MALUKU UTARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
33	IRJA BARAT	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	JUMLAH PROPINSI	**39.173**	**3.917**	**3.526**	**3.526**	**3.134**	**2.742**	**3.134**	**3.134**	**2.742**	**2.350**	**3.134**	**3.526**	**4.309**

MENTERI PERTANIAN,

ANTONI APRIYANTONO

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	4.337	434	390	390	347	304	347	347	304	260	347	390	477
2	SUMATERA UTARA	10.886	1.089	980	980	871	762	871	871	762	653	871	980	1.197
3	SUMATERA BARAT	8.432	843	759	759	675	590	675	675	590	506	675	759	928
4	J A M B I	5.541	554	499	499	443	388	443	443	388	332	443	499	610
5	R I A U	3.614	361	325	325	289	253	289	289	253	217	289	325	398
6	BENGKULU	2.771	277	249	249	222	194	222	222	194	166	222	249	305
7	SUMATERA SELATAN	12.046	1.205	1.084	1.084	964	843	964	964	843	723	964	1.084	1.325
8	BANGKA BELITUNG	843	84	76	76	67	59	67	67	59	51	67	76	93
9	LAMPUNG	13.475	1.348	1.213	1.213	1.078	943	1.078	1.078	943	809	1.078	1.213	1.482
10	KEP. RIAU	96	10	9	9	8	7	8	8	7	6	8	9	11
11	DKI. JAKARTA	19	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
12	BANTEN	4.578	458	412	412	366	320	366	366	320	275	366	412	504
13	JAWA BARAT	44.571	4.457	4.011	4.011	3.566	3.120	3.566	3.566	3.120	2.674	3.566	4.011	4.903
14	D.I. YOGYAKARTA	6.023	602	542	542	482	422	482	482	422	361	482	542	663
15	JAWA TENGAH	39.753	3.975	3.578	3.578	3.180	2.783	3.180	3.180	2.783	2.385	3.180	3.578	4.373
16	JAWA TIMUR	53.004	5.300	4.770	4.770	4.240	3.710	4.240	4.240	3.710	3.180	4.240	4.770	5.830
17	B A L I	1.446	145	130	130	116	101	116	116	101	87	116	130	159
18	KALIMANTAN BARAT	2.168	217	195	195	173	152	173	173	152	130	173	195	239
19	KALIMANTAN TENGAH	1.446	145	130	130	116	101	116	116	101	87	116	130	159
20	KALIMANTAN SELATAN	2.232	223	201	201	179	156	179	179	156	134	179	201	246
21	KALIMANTAN TIMUR	1.927	193	173	173	154	135	154	154	135	116	154	173	212
22	SULAWESI UTARA	1.154	115	104	104	92	81	92	92	81	69	92	104	127
23	GORONTALO	482	48	43	43	39	34	39	39	34	29	39	43	53
24	SULAWESI TENGAH	1.205	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	133
25	SULAWESI TENGGARA	1.686	169	152	152	135	118	135	135	118	101	135	152	186
26	SULAWESI SELATAN	10.842	1.084	976	976	867	759	867	867	759	650	867	976	1.193
27	SULAWESI BARAT	964	96	87	87	77	67	77	77	67	58	77	87	106
28	NUSA TENGGARA BARAT	3.614	361	325	325	289	253	289	289	253	217	289	325	398
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1.205	120	108	108	96	84	96	96	84	72	96	108	133
30	MALUKU	60	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	7
31	PAPUA	361	36	33	33	29	25	29	29	25	22	29	33	40
32	MALUKU UTARA	48	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
33	IRJA BARAT	96	10	9	9	8	7	8	8	7	6	8	9	11
	JUMLAH PROPINSI	**240.925**	**24.093**	**21.683**	**21.683**	**19.274**	**16.865**	**19.274**	**19.274**	**16.865**	**14.456**	**19.274**	**21.683**	**26.502**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	19	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
2	SUMATERA UTARA	49	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
3	SUMATERA BARAT	38	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4
4	J A M B I	25	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
5	R I A U	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
6	BENGKULU	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	SUMATERA SELATAN	54	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	6
8	BANGKA BELITUNG	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LAMPUNG	60	6	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	7
10	KEP. RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	21	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2
13	JAWA BARAT	200	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
14	D.I. YOGYAKARTA	27	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
15	JAWA TENGAH	178	18	16	16	14	12	14	14	12	11	14	16	20
16	JAWA TIMUR	237	24	21	21	19	17	19	19	17	14	19	21	26
17	B A L I	6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
18	KALIMANTAN BARAT	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	KALIMANTAN TENGAH	6	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
20	KALIMANTAN SELATAN	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	KALIMANTAN TIMUR	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SULAWESI UTARA	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	GORONTALO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SULAWESI TENGAH	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	SULAWESI TENGGARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
26	SULAWESI SELATAN	49	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	5
27	SULAWESI BARAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NUSA TENGGARA BARAT	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
29	NUSA TENGGARA TIMUR	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	MALUKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	1.079	108	97	97	86	76	86	86	76	65	86	97	119

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	1.034	103	93	93	83	72	83	83	72	62	83	93	114
2	SUMATERA UTARA	2.596	260	234	234	208	182	208	208	182	156	208	234	286
3	SUMATERA BARAT	2.011	201	181	181	161	141	161	161	141	121	161	181	221
4	JAMBI	1.321	132	119	119	106	93	106	106	93	79	106	119	145
5	RIAU	862	86	78	78	69	60	69	69	60	52	69	78	95
6	BENGKULU	661	66	59	59	53	46	53	53	46	40	53	59	73
7	SUMATERA SELATAN	2.873	287	259	259	230	201	230	230	201	172	230	259	316
8	BANGKA BELITUNG	201	20	18	18	16	14	16	16	14	12	16	18	22
9	LAMPUNG	3.214	321	289	289	257	225	257	257	225	193	257	289	353
10	KEP. RIAU	23	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
11	DKI. JAKARTA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	BANTEN	1.092	109	98	98	87	76	87	87	76	65	87	98	120
13	JAWA BARAT	10.629	1.063	957	957	850	744	850	850	744	638	850	957	1.169
14	D.I. YOGYAKARTA	1.436	144	129	129	115	101	115	115	101	86	115	129	158
15	JAWA TENGAH	9.480	948	853	853	758	664	758	758	664	569	758	853	1.043
16	JAWA TIMUR	12.640	1.264	1.136	1.138	1.011	885	1.011	1.011	885	758	1.011	1.138	1.390
17	BALI	345	34	31	31	28	24	28	28	24	21	28	31	38
18	KALIMANTAN BARAT	517	52	47	47	41	36	41	41	36	31	41	47	57
19	KALIMANTAN TENGAH	345	34	31	31	28	24	28	28	24	21	28	31	38
20	KALIMANTAN SELATAN	532	53	48	48	43	37	43	43	37	32	43	48	59
21	KALIMANTAN TIMUR	460	46	41	41	37	32	37	37	32	28	37	41	51
22	SULAWESI UTARA	275	28	25	25	22	19	22	22	19	17	22	25	30
23	GORONTALO	115	11	10	10	9	8	9	9	8	7	9	10	13
24	SULAWESI TENGAH	287	29	26	26	23	20	23	23	20	17	23	26	32
25	SULAWESI TENGGARA	402	40	36	36	32	28	32	32	28	24	32	36	44
26	SULAWESI SELATAN	2.586	259	233	233	207	181	207	207	181	155	207	233	284
27	SULAWESI BARAT	230	23	21	21	18	16	18	18	16	14	18	21	25
28	NUSA TENGGARA BARAT	862	86	78	78	69	60	69	69	60	52	69	78	95
29	NUSA TENGGARA TIMUR	287	29	26	26	23	20	23	23	20	17	23	26	32
30	MALUKU	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
31	PAPUA	86	9	8	8	7	6	7	7	6	5	7	8	9
32	MALUKU UTARA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IRJA BARAT	23	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
	JUMLAH PROPINSI	**57.456**	**5.746**	**5.171**	**5.171**	**4.596**	**4.022**	**4.596**	**4.596**	**4.022**	**3.447**	**4.596**	**5.171**	**6.320**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76/Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	4.341	430	360	347	304	391	347	347	313	321	365	395	421
2	SUMATERA UTARA	39.575	3.918	3.285	3.166	2.770	3.562	3.166	3.166	2.849	2.929	3.324	3.601	3.839
3	SUMATERA BARAT	14.310	1.417	1.188	1.145	1.002	1.288	1.145	1.145	1.030	1.059	1.202	1.302	1.388
4	J A M B I	3.444	341	286	276	241	310	276	276	248	255	289	313	334
5	R I A U	4.835	479	401	387	338	435	387	387	348	358	406	440	469
6	BENGKULU	1.828	181	152	146	128	165	146	146	132	135	154	166	177
7	SUMATERA SELATAN	3.708	367	308	297	260	334	297	297	267	274	311	337	360
8	BANGKA BELITUNG	591	59	49	47	41	53	47	47	43	44	50	54	57
9	LAMPUNG	7.674	760	637	614	537	691	614	614	553	568	645	698	744
10	KEP. RIAU	30	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3
11	DKI. JAKARTA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	1.350	134	112	108	95	122	108	108	97	100	113	123	131
13	JAWA BARAT	65.655	6.500	5.449	5.252	4.596	5.909	5.252	5.252	4.727	4.858	5.515	5.975	6.369
14	D.I. YOGYAKARTA	11.395	1.128	946	912	798	1.026	912	912	820	843	957	1.037	1.105
15	JAWA TENGAH	122.251	12.103	10.147	9.780	8.558	11.003	9.780	9.780	8.802	9.047	10.269	11.125	11.858
16	JAWA TIMUR	334.412	33.107	27.756	26.753	23.409	30.097	26.753	26.753	24.078	24.746	28.091	30.431	32.438
17	B A L I	8.815	873	732	705	617	793	705	705	635	652	740	802	855
18	KALIMANTAN BARAT	257	25	21	21	18	23	21	21	19	19	22	23	25
19	KALIMANTAN TENGAH	122	12	10	10	9	11	10	10	9	9	10	11	12
20	KALIMANTAN SELATAN	937	93	78	75	66	84	75	75	67	69	79	85	91
21	KALIMANTAN TIMUR	1.190	118	99	95	83	107	95	95	86	88	100	108	115
22	SULAWESI UTARA	70	7	6	6	5	6	6	6	5	5	6	6	7
23	GORONTALO	55	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5
24	SULAWESI TENGAH	6.705	664	557	536	469	603	536	536	483	496	563	610	650
25	SULAWESI TENGGARA	3.841	380	319	307	269	346	307	307	277	284	323	350	373
26	SULAWESI SELATAN	50.152	4.965	4.163	4.012	3.511	4.514	4.012	4.012	3.611	3.711	4.213	4.564	4.865
27	SULAWESI BARAT	4.578	453	380	366	320	412	366	366	330	339	385	417	444
28	NUSA TENGGARA BARAT	7.001	693	581	560	490	630	560	560	504	518	588	637	679
29	NUSA TENGGARA TIMUR	242	24	20	19	17	22	19	19	17	18	20	22	23
30	MALUKU	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	PAPUA	409	40	34	33	29	37	33	33	29	30	34	37	40
32	MALUKU UTARA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	191	19	16	15	13	17	15	15	14	14	16	17	19
	JUMLAH PROPINSI	**700.000**	**69.300**	**58.100**	**56.000**	**49.000**	**63.000**	**56.000**	**56.000**	**50.400**	**51.800**	**58.800**	**63.700**	**67.900**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	1.847	183	153	148	129	166	148	148	133	137	155	168	179
2	SUMATERA UTARA	16.840	1.667	1.398	1.347	1.179	1.516	1.347	1.347	1.213	1.245	1.415	1.532	1.634
3	SUMATERA BARAT	6.089	603	505	487	426	548	487	487	438	451	512	554	591
4	J A M B I	1.466	145	122	117	103	132	117	117	106	108	123	133	142
5	R I A U	2.057	204	171	165	144	185	165	165	148	152	173	187	200
6	BENGKULU	778	77	65	62	54	70	62	62	56	56	65	71	75
7	SUMATERA SELATAN	1.578	156	131	126	110	142	126	126	114	117	133	144	153
8	BANGKA BELITUNG	251	25	21	20	18	23	20	20	18	19	21	23	24
9	LAMPUNG	3.266	323	271	261	229	294	261	261	235	242	274	297	317
10	KEP. RIAU	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	574	57	48	46	40	52	46	46	41	43	48	52	56
13	JAWA BARAT	27.938	2.766	2.319	2.235	1.956	2.514	2.235	2.235	2.012	2.067	2.347	2.542	2.710
14	D.I. YOGYAKARTA	4.849	480	402	388	339	436	388	388	349	359	407	441	470
15	JAWA TENGAH	52.021	5.150	4.318	4.162	3.641	4.682	4.162	4.162	3.746	3.850	4.370	4.734	5.046
16	JAWA TIMUR	142.302	14.088	11.811	11.384	9.961	12.807	11.384	11.384	10.246	10.530	11.953	12.949	13.803
17	B A L I	3.751	371	311	300	263	338	300	300	270	278	315	341	364
18	KALIMANTAN BARAT	109	11	9	9	8	10	9	9	8	8	9	10	11
19	KALIMANTAN TENGAH	52	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5
20	KALIMANTAN SELATAN	399	39	33	32	28	36	32	32	29	30	33	36	39
21	KALIMANTAN TIMUR	506	50	42	41	35	46	41	41	36	37	43	46	49
22	SULAWESI UTARA	30	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3
23	GORONTALO	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	SULAWESI TENGAH	2.853	282	237	228	200	257	228	228	205	211	240	260	277
25	SULAWESI TENGGARA	1.634	162	136	131	114	147	131	131	118	121	137	149	159
26	SULAWESI SELATAN	21.341	2.113	1.771	1.707	1.494	1.921	1.707	1.707	1.537	1.579	1.793	1.942	2.070
27	SULAWESI BARAT	1.948	193	162	156	136	175	156	156	140	144	164	177	189
28	NUSA TENGGARA BARAT	2.979	295	247	238	209	268	238	238	214	220	250	271	289
29	NUSA TENGGARA TIMUR	103	10	9	8	7	9	8	8	7	8	9	9	10
30	MALUKU	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	174	17	14	14	12	16	14	14	13	13	15	16	17
32	MALUKU UTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	81	8	7	7	6	7	7	7	6	6	7	7	8
	JUMLAH PROPINSI	**297.870**	**29.489**	**24.723**	**23.830**	**20.851**	**26.808**	**23.830**	**23.830**	**21.447**	**22.042**	**25.021**	**27.106**	**28.893**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.15. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	753	75	63	60	53	68	60	60	54	56	63	69	73
2	SUMATERA UTARA	6.868	680	570	549	481	616	549	549	494	508	577	625	666
3	SUMATERA BARAT	2.483	246	206	199	174	223	199	199	179	184	209	226	241
4	J A M B I	598	59	50	48	42	54	48	48	43	44	50	54	58
5	R I A U	839	83	70	67	59	75	67	67	60	62	70	76	81
6	BENGKULU	317	31	26	25	22	29	25	25	23	23	27	29	31
7	SUMATERA SELATAN	643	64	53	51	45	58	51	51	46	48	54	59	62
8	BANGKA BELITUNG	103	10	9	8	7	9	8	8	7	8	9	9	10
9	LAMPUNG	1.332	132	111	107	93	120	107	107	96	99	112	121	129
10	KEP. RIAU	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	DKI. JAKARTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	234	23	19	19	16	21	19	19	17	17	20	21	23
13	JAWA BARAT	11.394	1.128	946	911	798	1.025	911	911	820	843	957	1.037	1.105
14	D.I. YOGYAKARTA	1.977	196	164	158	138	178	158	158	142	146	166	180	192
15	JAWA TENGAH	21.215	2.100	1.761	1.697	1.485	1.909	1.697	1.697	1.527	1.570	1.782	1.931	2.058
16	JAWA TIMUR	58.033	5.745	4.817	4.643	4.062	5.223	4.643	4.643	4.178	4.294	4.875	5.281	5.629
17	B A L I	1.530	151	127	122	107	138	122	122	110	113	128	139	148
18	KALIMANTAN BARAT	45	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
19	KALIMANTAN TENGAH	21	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
20	KALIMANTAN SELATAN	163	16	13	13	11	15	13	13	12	12	14	15	16
21	KALIMANTAN TIMUR	207	20	17	17	14	19	17	17	15	15	17	19	20
22	SULAWESI UTARA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	GORONTALO	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	SULAWESI TENGAH	1.164	115	97	93	81	105	93	93	84	86	98	106	113
25	SULAWESI TENGGARA	667	66	55	53	47	60	53	53	48	49	56	61	65
26	SULAWESI SELATAN	8.703	862	722	696	609	783	696	696	627	644	731	792	844
27	SULAWESI BARAT	794	79	66	64	56	72	64	64	57	59	67	72	77
28	NUSA TENGGARA BARAT	1.215	120	101	97	85	109	97	97	87	90	102	111	118
29	NUSA TENGGARA TIMUR	42	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4
30	MALUKU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	71	7	6	6	5	6	6	6	5	5	6	6	7
32	MALUKU UTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	33	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3
	JUMLAH PROPINSI	**121.475**	**12.026**	**10.082**	**9.718**	**8.503**	**10.933**	**9.718**	**9.718**	**8.746**	**8.989**	**10.204**	**11.054**	**11.783**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.16. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	1.730	171	144	138	121	156	138	138	125	128	145	157	168
2	SUMATERA UTARA	15.773	1.562	1.309	1.262	1.104	1.420	1.262	1.262	1.136	1.167	1.325	1.435	1.530
3	SUMATERA BARAT	5.703	565	473	456	399	513	456	456	411	422	479	519	553
4	J A M B I	1.373	136	114	110	96	124	110	110	99	102	115	125	133
5	R I A U	1.927	191	160	154	135	173	154	154	139	143	162	175	187
6	BENGKULU	729	72	60	58	51	66	58	58	52	54	61	66	71
7	SUMATERA SELATAN	1.478	146	123	118	103	133	118	118	106	109	124	134	143
8	BANGKA BELITUNG	236	23	20	19	16	21	19	19	17	17	20	21	23
9	LAMPUNG	3.059	303	254	245	214	275	245	245	220	226	257	278	297
10	KEP. RIAU	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	538	53	45	43	38	48	43	43	39	40	45	49	52
13	JAWA BARAT	26.168	2.591	2.172	2.093	1.832	2.355	2.093	2.093	1.884	1.936	2.198	2.381	2.538
14	D.I. YOGYAKARTA	4.542	450	377	363	318	409	363	363	327	336	381	413	441
15	JAWA TENGAH	48.724	4.824	4.044	3.898	3.411	4.385	3.898	3.898	3.508	3.606	4.093	4.434	4.726
16	JAWA TIMUR	133.284	13.195	11.063	10.663	9.330	11.996	10.663	10.663	9.596	9.863	11.196	12.129	12.929
17	B A L I	3.513	348	292	281	246	316	281	281	253	260	295	320	341
18	KALIMANTAN BARAT	102	10	9	8	7	9	8	8	7	8	9	9	10
19	KALIMANTAN TENGAH	49	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5
20	KALIMANTAN SELATAN	373	37	31	30	26	34	30	30	27	28	31	34	36
21	KALIMANTAN TIMUR	474	47	39	38	33	43	38	38	34	35	40	43	46
22	SULAWESI UTARA	28	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
23	GORONTALO	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	SULAWESI TENGAH	2.672	265	222	214	187	241	214	214	192	198	224	243	259
25	SULAWESI TENGGARA	1.531	152	127	122	107	138	122	122	110	113	129	139	148
26	SULAWESI SELATAN	19.989	1.979	1.659	1.599	1.399	1.799	1.599	1.599	1.439	1.479	1.679	1.819	1.939
27	SULAWESI BARAT	1.825	181	151	146	128	164	146	146	131	135	153	166	177
28	NUSA TENGGARA BARAT	2.790	276	232	223	195	251	223	223	201	206	234	254	271
29	NUSA TENGGARA TIMUR	96	10	8	8	7	9	8	8	7	7	8	9	9
30	MALUKU	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	163	16	14	13	11	15	13	13	12	12	14	15	16
32	MALUKU UTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	76	8	6	6	5	7	6	6	5	6	6	7	7
	JUMLAH PROPINSI	**278.992**	**27.620**	**23.156**	**22.319**	**19.529**	**25.109**	**22.319**	**22.319**	**20.087**	**20.645**	**23.435**	**25.388**	**27.062**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.17. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SUMATERA UTARA	94	9	8	8	7	8	8	8	7	7	8	9	9
3	SUMATERA BARAT	34	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3
4	J A M B I	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	R I A U	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	BENGKULU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SUMATERA SELATAN	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	BANGKA BELITUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LAMPUNG	18	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2
10	KEP. RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JAWA BARAT	156	15	13	12	11	14	12	12	11	12	13	14	15
14	D.I. YOGYAKARTA	27	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
15	JAWA TENGAH	290	29	24	23	20	26	23	23	21	21	24	26	28
16	JAWA TIMUR	794	79	66	63	56	71	63	63	57	59	67	72	77
17	B A L I	21	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
18	KALIMANTAN BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KALIMANTAN SELATAN	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KALIMANTAN TIMUR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SULAWESI TENGAH	16	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
25	SULAWESI TENGGARA	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	SULAWESI SELATAN	119	12	10	10	8	11	10	10	9	9	10	11	12
27	SULAWESI BARAT	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	NUSA TENGGARA BARAT	17	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MALUKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	**1.661**	**164**	**138**	**133**	**116**	**150**	**133**	**133**	**120**	**123**	**140**	**151**	**161**

MENTERI PERTANIAN,

ANTONI ARIFANTONO

Lampiran 3.18. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	13.500	810	1.080	810	945	1.215	1.080	945	1.080	1.080	1.350	1.485	1.620
2	SUMATERA UTARA	54.045	3.243	4.324	3.243	3.783	4.864	4.324	3.783	4.324	4.324	5.404	5.945	6.485
3	SUMATERA BARAT	32.400	1.944	2.592	1.944	2.268	2.916	2.592	2.268	2.592	2.592	3.240	3.564	3.888
4	J A M B I	10.800	648	864	648	756	972	864	756	864	864	1.080	1.188	1.296
5	R I A U	12.600	756	1.008	756	882	1.134	1.008	882	1.008	1.008	1.260	1.386	1.512
6	BENGKULU	9.000	540	720	540	630	810	720	630	720	720	900	990	1.080
7	SUMATERA SELATAN	36.000	2.160	2.880	2.160	2.520	3.240	2.880	2.520	2.880	2.880	3.600	3.960	4.320
8	BANGKA BELITUNG	4.500	270	360	270	315	405	360	315	360	360	450	495	540
9	LAMPUNG	45.000	2.700	3.600	2.700	3.150	4.050	3.600	3.150	3.600	3.600	4.500	4.950	5.400
10	KEP. RIAU	540	32	43	32	38	49	43	38	43	43	54	59	65
11	DKI. JAKARTA	180	11	14	11	13	16	14	13	14	14	18	20	22
12	BANTEN	14.850	891	1.188	891	1.040	1.337	1.188	1.040	1.188	1.188	1.485	1.634	1.782
13	JAWA BARAT	126.000	7.560	10.080	7.560	8.820	11.340	10.080	8.820	10.080	10.080	12.600	13.860	15.120
14	D.I. YOGYAKARTA	13.050	783	1.044	783	914	1.175	1.044	914	1.044	1.044	1.305	1.436	1.566
15	JAWA TENGAH	135.000	8.100	10.800	8.100	9.450	12.150	10.800	9.450	10.800	10.800	13.500	14.850	16.200
16	JAWA TIMUR	270.000	16.200	21.600	16.200	18.900	24.300	21.600	18.900	21.600	21.600	27.000	29.700	32.400
17	B A L I	15.750	945	1.260	945	1.103	1.418	1.260	1.103	1.260	1.260	1.575	1.733	1.890
18	KALIMANTAN BARAT	13.500	810	1.080	810	945	1.215	1.080	945	1.080	1.080	1.350	1.485	1.620
19	KALIMANTAN TENGAH	8.100	486	648	486	567	729	648	567	648	648	810	891	972
20	KALIMANTAN SELATAN	9.000	540	720	540	630	810	720	630	720	720	900	990	1.080
21	KALIMANTAN TIMUR	5.850	351	468	351	410	527	468	410	468	468	585	644	702
22	SULAWESI UTARA	7.200	432	576	432	504	648	576	504	576	576	720	792	864
23	GORONTALO	6.750	405	540	405	473	608	540	473	540	540	675	743	810
24	SULAWESI TENGAH	6.300	378	504	378	441	567	504	441	504	504	630	693	756
25	SULAWESI TENGGARA	3.600	216	288	216	252	324	288	252	288	288	360	396	432
26	SULAWESI SELATAN	27.450	1.647	2.196	1.647	1.922	2.471	2.196	1.922	2.196	2.196	2.745	3.020	3.294
27	SULAWESI BARAT	2.610	157	209	157	183	235	209	183	209	209	261	287	313
28	NUSA TENGGARA BARAT	10.800	648	864	648	756	972	864	756	864	864	1.080	1.188	1.296
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1.350	81	108	81	95	122	108	95	108	108	135	149	162
30	MALUKU	1.125	68	90	68	79	101	90	79	90	90	113	124	135
31	PAPUA	1.350	81	108	81	95	122	108	95	108	108	135	149	162
32	MALUKU UTARA	720	43	58	43	50	65	58	50	58	58	72	79	86
33	IRJA BARAT	1.080	65	86	65	76	97	86	76	86	86	108	119	130
	JUMLAH PROPINSI	**900.000**	**54.000**	**72.000**	**54.000**	**63.000**	**81.000**	**72.000**	**63.000**	**72.000**	**72.000**	**90.000**	**99.000**	**108.000**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.19. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76/Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	NAD	8.593	516	687	516	602	773	687	602	687	687	859	945	1.031
2	SUMATERA UTARA	34.402	2.064	2.752	2.064	2.408	3.096	2.752	2.408	2.752	2.752	3.440	3.784	4.128
3	SUMATERA BARAT	20.624	1.237	1.650	1.237	1.444	1.856	1.650	1.444	1.650	1.650	2.062	2.269	2.475
4	JAMBI	6.875	412	550	412	481	619	550	481	550	550	687	756	825
5	RIAU	8.021	481	642	481	561	722	642	561	642	642	802	882	962
6	BENGKULU	5.729	344	458	344	401	516	458	401	458	458	573	630	687
7	SUMATERA SELATAN	22.916	1.375	1.833	1.375	1.604	2.062	1.833	1.604	1.833	1.833	2.292	2.521	2.750
8	BANGKA BELITUNG	2.864	172	229	172	201	258	229	201	229	229	286	315	344
9	LAMPUNG	28.645	1.719	2.292	1.719	2.005	2.578	2.292	2.005	2.292	2.292	2.864	3.151	3.437
10	KEP. RIAU	344	21	27	21	24	31	27	24	27	27	34	38	41
11	DKI. JAKARTA	115	7	9	7	8	10	9	8	9	9	11	13	14
12	BANTEN	9.453	567	756	567	662	851	756	662	756	756	945	1.040	1.134
13	JAWA BARAT	80.205	4.812	6.416	4.812	5.614	7.218	6.416	5.614	6.416	6.416	8.021	8.823	9.625
14	D.I. YOGYAKARTA	8.307	498	665	498	581	748	665	581	665	665	831	914	997
15	JAWA TENGAH	85.934	5.156	6.875	5.156	6.015	7.734	6.875	6.015	6.875	6.875	8.593	9.453	10.312
16	JAWA TIMUR	171.868	10.312	13.749	10.312	12.031	15.468	13.749	12.031	13.749	13.749	17.187	18.906	20.624
17	BALI	10.026	602	802	602	702	902	802	702	802	802	1.003	1.103	1.203
18	KALIMANTAN BARAT	8.593	516	687	516	602	773	687	602	687	687	859	945	1.031
19	KALIMANTAN TENGAH	5.156	309	412	309	361	464	412	361	412	412	516	567	619
20	KALIMANTAN SELATAN	5.729	344	458	344	401	516	458	401	458	458	573	630	687
21	KALIMANTAN TIMUR	3.724	223	298	223	261	335	298	261	298	298	372	410	447
22	SULAWESI UTARA	4.583	275	367	275	321	412	367	321	367	367	458	504	550
23	GORONTALO	4.297	258	344	258	301	387	344	301	344	344	430	473	516
24	SULAWESI TENGAH	4.010	241	321	241	281	361	321	281	321	321	401	441	481
25	SULAWESI TENGGARA	2.292	137	183	137	160	206	183	160	183	183	229	252	275
26	SULAWESI SELATAN	17.473	1.048	1.398	1.048	1.223	1.573	1.398	1.223	1.398	1.398	1.747	1.922	2.097
27	SULAWESI BARAT	1.661	100	133	100	116	150	133	116	133	133	166	183	199
28	NUSA TENGGARA BARAT	6.875	412	550	412	481	619	550	481	550	550	687	756	825
29	NUSA TENGGARA TIMUR	859	52	69	52	60	77	69	60	69	69	86	95	103
30	MALUKU	716	43	57	43	50	64	57	50	57	57	72	79	86
31	PAPUA	859	52	69	52	60	77	69	60	69	69	86	95	103
32	MALUKU UTARA	458	27	37	27	32	41	37	32	37	37	46	50	55
33	IRJA BARAT	687	41	55	41	48	62	55	48	55	55	69	76	82
	JUMLAH PROPINSI	**572.895**	**34.374**	**45.832**	**34.374**	**40.103**	**51.561**	**45.832**	**40.103**	**45.832**	**45.832**	**57.289**	**63.018**	**68.747**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.20. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	1.211	73	97	73	85	109	97	85	97	97	121	133	145
2	SUMATERA UTARA	4.849	291	388	291	339	436	388	339	388	388	485	533	582
3	SUMATERA BARAT	2.907	174	233	174	204	262	233	204	233	233	291	320	349
4	J A M B I	969	58	78	58	68	87	78	68	78	78	97	107	116
5	R I A U	1 131	68	90	68	79	102	90	79	90	90	113	124	136
6	BENGKULU	809	45	65	48	57	73	65	57	65	65	81	89	97
7	SUMATERA SELATAN	3.230	194	258	194	226	291	258	226	258	258	323	355	388
8	BANGKA BELITUNG	404	24	32	24	28	36	32	28	32	32	40	44	48
9	LAMPUNG	4.036	242	323	242	283	363	323	283	323	323	404	444	485
10	KEP. RIAU	48	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	6
11	DKI. JAKARTA	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
12	BANTEN	1.332	80	107	80	93	120	107	93	107	107	133	147	160
13	JAWA BARAT	11.306	678	904	678	791	1.018	904	791	904	904	1.131	1.244	1.357
14	D.I. YOGYAKARTA	1.171	70	94	70	82	105	94	82	94	94	117	129	141
15	JAWA TENGAH	12.113	727	969	727	848	1.090	969	848	969	969	1.211	1.332	1.454
16	JAWA TIMUR	24.227	1.454	1.938	1.454	1.696	2.180	1.938	1.696	1.938	1.938	2.423	2.665	2.907
17	B A L I	1.413	85	113	85	99	127	113	99	113	113	141	155	170
18	KALIMANTAN BARAT	1.211	73	97	73	85	109	97	85	97	97	121	133	145
19	KALIMANTAN TENGAH	727	44	58	44	51	65	58	51	58	58	73	80	87
20	KALIMANTAN SELATAN	808	48	65	48	57	73	65	57	65	65	81	89	97
21	KALIMANTAN TIMUR	525	31	42	31	37	47	42	37	42	42	52	58	63
22	SULAWESI UTARA	646	39	52	39	45	58	52	45	52	52	65	71	78
23	GORONTALO	606	36	48	36	42	55	48	42	48	48	61	67	73
24	SULAWESI TENGAH	565	34	45	34	40	51	45	40	45	45	57	62	68
25	SULAWESI TENGGARA	323	19	26	19	23	29	26	23	26	26	32	36	39
26	SULAWESI SELATAN	2.463	148	197	148	172	222	197	172	197	197	246	271	296
27	SULAWESI BARAT	234	14	19	14	16	21	19	16	19	19	23	26	28
28	NUSA TENGGARA BARAT	969	58	78	58	68	87	78	68	78	78	97	107	116
29	NUSA TENGGARA TIMUR	121	7	10	7	8	11	10	8	10	10	12	13	15
30	MALUKU	101	6	8	6	7	9	8	7	8	8	10	11	12
31	PAPUA	121	7	10	7	8	11	10	8	10	10	12	13	15
32	MALUKU UTARA	65	4	5	4	5	6	5	5	5	5	6	7	8
33	IRJA BARAT	97	6	8	6	7	9	8	7	8	8	10	11	12
	JUMLAH PROPINSI	**80.755**	**4.845**	**6.460**	**4.845**	**5.653**	**7.268**	**6.460**	**5.653**	**6.460**	**6.460**	**8.076**	**8.883**	**9.691**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.21. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	3.695	222	296	222	259	333	296	259	296	296	370	406	443
2	SUMATERA UTARA	14.793	888	1.183	888	1.036	1.331	1.183	1.036	1.183	1.183	1.479	1.627	1.775
3	SUMATERA BARAT	8.869	532	709	532	621	798	709	621	709	709	887	976	1.064
4	J A M B I	2.956	177	236	177	207	266	236	207	236	236	296	325	355
5	R I A U	3.449	207	276	207	241	310	276	241	276	276	345	379	414
6	BENGKULU	2.464	148	197	148	172	222	197	172	197	197	246	271	296
7	SUMATERA SELATAN	9.854	591	788	591	690	887	788	690	788	788	985	1.084	1.182
8	BANGKA BELITUNG	1.232	74	99	74	86	111	99	86	99	99	123	135	148
9	LAMPUNG	12.318	739	985	739	862	1.109	985	862	985	985	1.232	1.355	1.478
10	KEP. RIAU	148	9	12	9	10	13	12	10	12	12	15	16	18
11	DKI. JAKARTA	49	3	4	3	3	4	4	3	4	4	5	5	6
12	BANTEN	4.065	244	325	244	285	366	325	285	325	325	406	447	488
13	JAWA BARAT	34.489	2.069	2.759	2.069	2.414	3.104	2.759	2.414	2.759	2.759	3.449	3.794	4.139
14	D.I. YOGYAKARTA	3.572	214	286	214	250	321	286	250	286	286	357	393	429
15	JAWA TENGAH	36.953	2.217	2.956	2.217	2.587	3.326	2.956	2.587	2.956	2.956	3.695	4.065	4.434
16	JAWA TIMUR	73.905	4.434	5.912	4.434	5.173	6.651	5.912	5.173	5.912	5.912	7.391	8.130	8.869
17	B A L I	4.311	259	345	259	302	388	345	302	345	345	431	474	517
18	KALIMANTAN BARAT	3.695	222	296	222	259	333	296	259	296	296	370	406	443
19	KALIMANTAN TENGAH	2.217	133	177	133	155	200	177	155	177	177	222	244	266
20	KALIMANTAN SELATAN	2.464	148	197	148	172	222	197	172	197	197	246	271	296
21	KALIMANTAN TIMUR	1.601	96	128	96	112	144	128	112	128	128	160	176	192
22	SULAWESI UTARA	1.971	118	158	118	138	177	158	138	158	158	197	217	236
23	GORONTALO	1.848	111	148	111	129	166	148	129	148	148	185	203	222
24	SULAWESI TENGAH	1.724	103	138	103	121	155	138	121	138	138	172	190	207
25	SULAWESI TENGGARA	985	59	79	59	69	89	79	69	79	79	99	108	118
26	SULAWESI SELATAN	7.514	451	601	451	526	676	601	526	601	601	751	827	902
27	SULAWESI BARAT	714	43	57	43	50	64	57	50	57	57	71	79	86
28	NUSA TENGGARA BARAT	2.956	177	236	177	207	266	236	207	236	236	296	325	355
29	NUSA TENGGARA TIMUR	370	22	30	22	26	33	30	26	30	30	37	41	44
30	MALUKU	308	18	25	18	22	28	25	22	25	25	31	34	37
31	PAPUA	370	22	30	22	26	33	30	26	30	30	37	41	44
32	MALUKU UTARA	197	12	16	12	14	18	16	14	16	16	20	22	24
33	IRJA BARAT	296	18	24	18	21	27	24	21	24	24	30	33	35
	JUMLAH PROPINSI	**246.350**	**14.781**	**19.708**	**14.781**	**17.245**	**22.172**	**19.708**	**17.245**	**19.708**	**19.708**	**24.635**	**27.099**	**29.562**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.22. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76/Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	2.000	120	160	120	140	180	160	140	160	160	200	220	240
2	SUMATERA UTARA	19.000	1.140	1.520	1.140	1.330	1.710	1.520	1.330	1.520	1.520	1.900	2.090	2.280
3	SUMATERA BARAT	13.000	780	1.040	780	910	1.170	1.040	910	1.040	1.040	1.300	1.430	1.560
4	J A M B I	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
5	R I A U	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
6	BENGKULU	4.000	240	320	240	280	360	320	250	320	320	400	440	480
7	SUMATERA SELATAN	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
8	BANGKA BELITUNG	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
9	LAMPUNG	12.000	720	960	720	840	1.080	960	840	960	960	1.200	1.320	1.440
10	KEP. RIAU	400	24	32	24	28	36	32	28	32	32	40	44	48
11	DKI. JAKARTA	50	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	6	6
12	BANTEN	19.950	1.197	1.596	1.197	1.397	1.796	1.596	1.397	1.596	1.596	1.995	2.195	2.394
13	JAWA BARAT	53.000	3.180	4.240	3.180	3.710	4.770	4.240	3.710	4.240	4.240	5.300	5.830	6.360
14	D.I. YOGYAKARTA	25.000	1.500	2.000	1.500	1.750	2.250	2.000	1.750	2.000	2.000	2.500	2.750	3.000
15	JAWA TENGAH	55.000	3.300	4.400	3.300	3.850	4.950	4.400	3.850	4.400	4.400	5.500	6.050	6.600
16	JAWA TIMUR	70.000	4.200	5.600	4.200	4.900	6.300	5.600	4.900	5.600	5.600	7.000	7.700	8.400
17	B A L I	25.000	1.500	2.000	1.500	1.750	2.250	2.000	1.750	2.000	2.000	2.500	2.750	3.000
18	KALIMANTAN BARAT	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
19	KALIMANTAN TENGAH	1.300	78	104	78	91	117	104	91	104	104	130	143	156
20	KALIMANTAN SELATAN	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
21	KALIMANTAN TIMUR	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
22	SULAWESI UTARA	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
23	GORONTALO	1.000	60	80	60	70	90	80	70	80	80	100	110	120
24	SULAWESI TENGAH	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
25	SULAWESI TENGGARA	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
26	SULAWESI SELATAN	7.550	453	604	453	529	680	604	529	604	604	755	831	906
27	SULAWESI BARAT	500	30	40	30	35	45	40	35	40	40	50	55	60
28	NUSA TENGGARA BARAT	6.000	360	480	360	420	540	480	420	480	480	600	660	720
29	NUSA TENGGARA TIMUR	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
30	MALUKU	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
31	PAPUA	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
32	MALUKU UTARA	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
33	IRJA BARAT	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
	JUMLAH PROPINSI	**345.000**	**20.700**	**27.600**	**20.700**	**24.150**	**31.050**	**27.600**	**24.150**	**27.600**	**27.600**	**34.500**	**37.950**	**41.400**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 3.23. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 76 /Permentan/OT.140/12/2007
Tanggal : 28 Desember 2007

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2008

Subsektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	N A D	2.000	120	160	120	140	180	160	140	160	160	200	220	240
2	SUMATERA UTARA	19.000	1.140	1.520	1.140	1.330	1.710	1.520	1.330	1.520	1.520	1.900	2.090	2.280
3	SUMATERA BARAT	13.000	780	1.040	780	910	1.170	1.040	910	1.040	1.040	1.300	1.430	1.560
4	J A M B I	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
5	R I A U	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
6	BENGKULU	4.000	240	320	240	280	360	320	280	320	320	400	440	480
7	SUMATERA SELATAN	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
8	BANGKA BELITUNG	5.000	300	400	300	350	450	400	350	400	400	500	550	600
9	LAMPUNG	12.000	720	960	720	840	1.080	960	840	960	960	1.200	1.320	1.440
10	KEP. RIAU	400	24	32	24	28	36	32	28	32	32	40	44	48
11	DKI. JAKARTA	50	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	6	6
12	BANTEN	19.950	1.197	1.596	1.197	1.397	1.796	1.596	1.397	1.596	1.596	1.995	2.195	2.394
13	JAWA BARAT	53.000	3.180	4.240	3.180	3.710	4.770	4.240	3.710	4.240	4.240	5.300	5.830	6.360
14	D.I. YOGYAKARTA	25.000	1.500	2.000	1.500	1.750	2.250	2.000	1.750	2.000	2.000	2.500	2.750	3.000
15	JAWA TENGAH	55.000	3.300	4.400	3.300	3.850	4.950	4.400	3.850	4.400	4.400	5.500	6.050	6.600
16	JAWA TIMUR	70.000	4.200	5.600	4.200	4.900	6.300	5.600	4.900	5.600	5.600	7.000	7.700	8.400
17	B A L I	25.000	1.500	2.000	1.500	1.750	2.250	2.000	1.750	2.000	2.000	2.500	2.750	3.000
18	KALIMANTAN BARAT	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
19	KALIMANTAN TENGAH	1.300	78	104	78	91	117	104	91	104	104	130	143	156
20	KALIMANTAN SELATAN	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
21	KALIMANTAN TIMUR	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
22	SULAWESI UTARA	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
23	GORONTALO	1.000	60	80	60	70	90	80	70	80	80	100	110	120
24	SULAWESI TENGAH	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
25	SULAWESI TENGGARA	1.500	90	120	90	105	135	120	105	120	120	150	165	180
26	SULAWESI SELATAN	7.550	453	604	453	529	680	604	529	604	604	755	831	906
27	SULAWESI BARAT	500	30	40	30	35	45	40	35	40	40	50	55	60
28	NUSA TENGGARA BARAT	6.000	360	480	360	420	540	480	420	480	480	600	660	720
29	NUSA TENGGARA TIMUR	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
30	MALUKU	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
31	PAPUA	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
32	MALUKU UTARA	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
33	IRJA BARAT	250	15	20	15	18	23	20	18	20	20	25	28	30
	JUMLAH PROPINSI	**345.000**	**20.700**	**27.600**	**20.700**	**24.150**	**31.050**	**27.600**	**24.150**	**27.600**	**27.600**	**34.500**	**37.950**	**41.400**

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO